

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan diketahui sebagai sumber penting dari informasi keuangan perusahaan. Setiap perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik diharuskan menyajikan laporan keuangan yang mana merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen dalam mengelola berbagai sumber daya perusahaan pada periode waktu tertentu. Laporan keuangan menjadi representasi dari performa suatu perusahaan, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk pelbagai pihak yang memiliki kepentingan, yaitu pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan untuk mengambil keputusan. Dasar penyusunan laporan keuangan di Indonesia dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI).

Dalam menyajikan laporan keuangan, perusahaan dituntut memberikan informasi yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan transparansi dan berguna untuk mengevaluasi kinerja perusahaan (An, 2017). Berkaitan dengan hal tersebut terdapat penerapan suatu prinsip yang disebut konservatisme. Penggunaan prinsip konservatisme membantu menghasilkan pelaporan keuangan yang transparan (Makhlouf, Al-sufy, & Almubaideen, 2018)

Konservatisme merupakan reaksi yang berhati-hati atas ketidakpastian yang ada, agar ketidakpastian dan resiko yang berkaitan dalam situasi bisnis bisa dipertimbangkan dengan cukup memadai. Pelaporan yang didasari dengan

kehati-hatian akan memberi manfaat yang terbaik untuk semua pengguna laporan keuangan. Perusahaan biasanya memiliki kejadian-kejadian yang tidak pasti. Diterapkannya konservatisme akan menciptakan biaya dan utang yang lebih tinggi, tetapi di sisi lain, pendapatan dan aset menjadi rendah dalam laporan keuangan, hal ini terjadi karena pada prinsip konservatisme akuntansi melakukan perlambatan pengakuan pendapatan, sebaliknya mempercepat mengakui biaya dan utang (Habiba, 2017). Penerapan prinsip konservatisme disebabkan karena akuntansi memakai akrual untuk membuat laporan keuangan, yaitu nilai akuntansi bukan hanya nilai riil dari aliran keluar dan masuk transaksi keuangan saja, tetapi juga pencatatan atas nilai transaksi akan kemungkinan dari keluar dan masuknya uang di masa mendatang yang disebabkan dari transaksi masa lalu dan masa sekarang (Savitri, 2016, p. 20). Penerapan konservatisme dirasa tepat dalam hal menghadapi ketidakpastian bisnis atau keadaan keragu-raguan (Syifa, Kristanti, & Dillak, 2017).

Meskipun beberapa studi empiris, sampai saat ini, telah menganalisis konservatisme, ada pro dan kontra terhadap penerapan konservatisme. Salah satu kritik dari pihak yang kontra adalah penerapan konservatisme yang memengaruhi hasil laporan keuangan. Pihak yang kontra dengan prinsip konservatisme mengemukakan bahwa apabila penyusunan laporan keuangan berdasarkan prinsip konservatisme, maka informasi yang dihasilkan menjadi bias (Habiba, 2017). Terlepas adanya pro dan kontra pada penerapan konservatisme, prinsip ini masih diterapkan. Prinsip konservatisme masih

diterapkan agar optimisme yang berlebihan dari manajemen dalam menyajikan laba dapat berkurang (Noviantari & Ratnadi, 2015).

Ada salah satu kasus yang terkait dengan penerapan konservatisme, yaitu yang terjadi pada PT Bank Bukopin Tbk. Banjarnahor (2018) PT Bank Bukopin Tbk merevisi laba di periode tahun 2016 dari yang tadinya Rp 1,08 triliun menjadi Rp 183,56 miliar. Penurunan yang paling besar ada pada pendapatan provisi dan komisi, yaitu pendapatan yang berasal dari kartu kredit. Pendapatan ini direvisi, yang tadinya Rp 1,06 triliun menjadi Rp 317,88 miliar. Selain itu, ada revisi juga pada pembiayaan anak usaha Bank Syariah Bukopin yaitu kenaikan saldo cadangan kerugian penurunan nilai debitur tertentu. Sehingga, beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan meningkat sejumlah Rp 148,6 miliar, dari yang tadinya Rp 649,05 miliar menjadi Rp 797,65 miliar yang berakibat meningkatnya beban perseroan.

Admin (2018) di dalam laporan keuangan 2017 terlampir di segmen Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian, laporan keuangan 2016 dan 2015 direvisi dengan kenaikan saldo cadangan kerugian penurunan nilai debitur tertentu. Manajemen menyampaikan melalui surat yang ditujukan ke BEI bahwa revisi ini adalah bentuk pertanggungjawaban dan penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bank Bukopin.

Silaban (2018) Pengamat Pasar Modal Teguh Hidayat mengatakan bahwa pada kasus Bank Bukopin, bisa jadi manajemen menilai bahwa beberapa kredit bermasalah pada bagian piutang kartu kredit dan piutang syariahnya tersebut belum termasuk ke dalam status macet, sehingga dicatat

sebagai aset. Untuk piutang yang berstatus macet, bank dilarang mencatat sebagai aset piutang, namun harus dicatat sebagai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang mewadahi dana dari masyarakat dengan bentuk simpanan dan disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya yang tujuannya untuk memajukan taraf hidup masyarakat. Sebagai lembaga jasa keuangan, salah satu kontribusi bank yang berpengaruh terhadap perekonomian negara yaitu penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (Fahril, 2018). Strategisnya peran bank sebagai *intermediary institution*, yang menghimpun dan menyalurkan dana untuk membiayai kegiatan sektor perekonomian menjadikan bank harus sangat hati-hati dalam operasionalnya, termasuk harus cermat dan hati-hati dalam melakukan penyajian laporan keuangan. Sehingga penyajian laporan keuangan yang berkualitas diperlukan karena menandakan bahwa bank tersebut merupakan lembaga keuangan yang andal, yang tentu saja hal ini akan berdampak pada perekonomian negara (Sanchez, Ferrero, & Meca, 2017).

Maka amat disayangkan praktik yang dilakukan oleh Bank Bukopin, yang mana dinilai bahwa Bank Bukopin kurang hati-hati dalam melakukan penyajian laporan keuangan. Artinya, pihak manajemen Bukopin sebelumnya kurang berhati-hati dalam memperkirakan atau menilai piutangnya. Kasus Bank Bukopin ini mendukung pemikiran yang menganggap bahwa

konservatisme adalah salah satu karakteristik pelaporan keuangan yang diperlukan untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas, sebagaimana dijelaskan oleh (Ugwunta & Ugwuanyi, 2019) dan (El-haq, Zulpahmi, & Sumardi, 2019).

Penerapan konservatisme dipengaruhi oleh pelbagai faktor, kepemilikan institusional adalah salah satunya. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham milik perusahaan oleh institusi lain, yang antara lain seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, dan lain sebagainya (Mehrani, Moradi, & Eskandar, 2016). Dibandingkan investor individu, investor institusional termasuk investor yang mempunyai kemampuan lebih baik dalam mengawasi tindakan manajemen (Putra, Sari, & Larasdiputra, 2019). Investor institusional dapat melakukan pengawasan secara efektif dan cenderung skeptis mengenai tindakan manajemen (Putra et al., 2019). Jadi, investastor institusional merupakan salah satu elemen kontrol yang efektif terhadap perusahaan dari pihak eksternal. Sehingga semakin banyak kepemilikan institusional, maka kontrol dari eksternal perusahaan juga semakin kuat.

Sebagai usaha dalam mengantisipasi laba yang *overstated*, kepemilikan institusional yang tinggi dapat mendorong permintaan untuk menerapkan konservatisme dalam pelaporan keuangan (Hakiki & Solikhah, 2019). Jadi, semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi penerapan konservatisme karena kepemilikan institusional memiliki fungsi pengawasan yang bisa mengurangi tindakan manajemen untuk melakukan manajemen laba

dengan melaporkan laba *overstated*. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agustina, Rice, & Stephen, 2016) yang meneliti pengaruh risiko perusahaan, ukuran perusahaan, leverage, pajak, intensitas modal, peluang pertumbuhan, struktur kepemilikan dan litigasi terhadap konservatisme pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2009-2011, hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap konservatisme. Namun, berdasarkan penelitian (Novianti & Astohar, 2015) yang meneliti pengaruh kepemilikan manajerial, kesulitan keuangan, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, jumlah partner yang memiliki izin akuntan, komite audit, dan ukuran kantor akuntan publik terhadap konservatisme pada perusahaan *property dan real estate* yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2009-2011, hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap konservatisme. Hal tersebut dikarenakan, apabila kepemilikan saham yang dimiliki institusi memiliki persentase yang tinggi maka manajemen akan memilih untuk menyajikan laba secara optimis, dengan begitu kinerja manajemen akan dinilai baik dan mendapatkan bonus (Savitri, 2016).

Faktor yang memengaruhi konservatisme selanjutnya adalah ukuran perusahaan. Salah satu indikator untuk meninjau biaya politik yang dibebankan kepada perusahaan adalah ukuran perusahaan (Savitri, 2016). Perusahaan yang berukuran besar punya sistem yang kompleks dan keuntungan yang lebih besar, karena hal tersebut perusahaan menanggung risiko yang lebih besar

(Yuliarti & Yanto, 2017). Ukuran perusahaan yang semakin besar, maka semakin besar juga kemungkinan perusahaan berorientasi menerapkan konservatisme agar biaya politis berkurang (Utama & Titik, 2018). Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susanto & Ramadhani, 2016) yang meneliti pengaruh likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, *growth opportunities*, dan intensitas modal terhadap konservatisme pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2010-2014, yang hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap konservatisme. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Samuel & Juliarto, 2015) yang meneliti pengaruh konvergensi *International Financial Reporting Standards (IFRS)*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap konservatisme pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2010-2013, hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme.

Financial distress adalah salah satu faktor yang memengaruhi penerapan konservatisme juga. *Financial distress* bisa diartikan sebagai sinyal atau gejala kebangkrutan dengan penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan, atau situasi sebelum bangkrut atau likuidasi (Saputra, 2016). Ketika perusahaan mengalami *financial distress*, manajemen cenderung akan berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena apabila manajemen salah langkah dalam mengambil keputusan, kelangsungan hidup perusahaan akan terancam (Rahayu, Kiswanto, & Gunawan, 2018).

Perusahaan dengan kondisi *financial distress* akan melakukan penerapan konservatisme, karena manajemen menjadi lebih berhati-hati dalam memperkirakan kondisi ekonomi yang mendatang (Risdiyani & Kusmuriyanto, 2015). Hal ini didukung dengan penelitian (Syifa et al., 2017) yang meneliti pengaruh *financial distress*, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap konservatisme pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2011-2015, hasilnya menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap konservatisme. Namun, penelitian dari (Rivandi & Ariska, 2019) yang meneliti pengaruh *dividend payout ratio*, intensitas modal, dan *financial distress* terhadap konservatisme pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2013-2017, hasilnya menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif pada konservatisme. Hal tersebut terjadi, karena manajemen cenderung menutupi kinerjanya yang buruk untuk menghindari pemegang saham mencetuskan pergantian manajemen.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, mendorong peneliti melakukan penelitian pada penerapan konservatisme dalam pelaporan keuangan perusahaan dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan *Financial Distress* terhadap Konservatisme”**.

1.2 Pernyataan Penelitian

Berdasarkan pemaparan di latar belakang, maka peneliti merumuskan pernyataan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap konservatisme?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap konservatisme?

3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap konservatisme?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap konservatisme;
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap konservatisme;
3. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap konservatisme;

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan konservatismePO;
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai pertimbangan perusahaan untuk menerapkan prinsip konservatisme akuntansi dalam melakukan pencatatan akuntansi. Selain itu diharapkan dapat mengatasi konflik keagenan;
3. Bagi investor, penelitian ini diharapkan penelitian ini dan yang sejenisnya dapat terus mendorong adanya tata kelola yang lebih baik di perusahaan. Sehingga perusahaan secara penyajian laporan keuangan dapat lebih akuntabel. Dengan harapan, investor akan mendapat perlindungan yang lebih baik.